



|             |                            |              |  |
|-------------|----------------------------|--------------|--|
| Media Title | Bisnis Indonesia           |              |  |
| Head Line   | Dokumen Lelang Disesuaikan |              |  |
| Date        | 27 Feb 2014                | Color        |  |
| Section     | News                       | Circulation  |  |
| Page No     | 26                         | Article Size |  |
| Journalist  | Dimas Novita               | Advalue      |  |
| Frequency   | Daily                      | PR Value     |  |



JAKARTA—BPJT akan menyesuaikan dokumen prakualifikasi lelang proyek jalan tol trans-Sumatra, jika pemerintah tidak juga menerbitkan peraturan presiden penugasan Utama Karya untuk mengerjakan proyek senilai Rp360 triliun tersebut.

Dimas Novita S.  
dimas.novita@bisnis.co.id

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Achmad Gani Ghazaly mengatakan dalam dokumen prakualifikasi disebutkan peserta tidak boleh mengajukan banding dan semcamnya bilamana perpres penugasan Utama Karya terbit.

"Jadi biar tidak bersinggungan. Kecuali jika memang ruas yang kami tenderkan tidak disebut dalam perpres," katanya, Rabu (26/2).

Seperti diketahui, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto tetap menginginkan jalan tol trans-Sumatra tetap ditender meskipun nantinya perpres penugasan Utama Karya tetap diterbitkan.

Hal ini disebabkan tidak adanya alokasi penyertaan modal negara

► Peserta tidak boleh mengajukan banding.

► Jalan tol Medan-Binjai paling mungkin untuk dilelang.

► Penugasan lebih baik karena mempercepat pembangunan.

(PMN) pada 2014 untuk BUMN tersebut, sehingga menteri pesimistis Utama Karya akan mengerjakan proyek tersebut meskipun perpres diteken.

Gani mengatakan BPJT bisa saja menender beberapa ruas yang menjadi bagian jaringan High Grade Highway Sumatra tersebut. Dalam konsep itu, jalan tidak boleh terputus dan harus tersambung.

"Jadi kalau yang *feasible*, ya bisa ditender untuk dijadikan milik badan usaha. Kalau tidak dicarikan skema lewat APBN seperti penugasan Utama Karya," jelasnya.

Dari puluhan ruas trans-Sumatra yang akan dibangun, dia menuturkan jalan tol Medan-Binjai paling mungkin untuk dilelang.

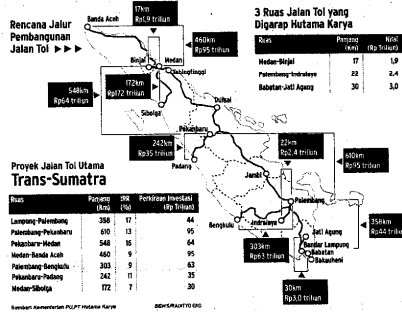
Saat ini, Dirjen Bina Marga Kementerian PU sudah mengajukan izin prinsip atas penggunaan tanah PT Perkebunan Nusantara (PTPN), sebanyak 70% dari total kebutuhan lahan jalan tol Medan-Binjai.

#### LANGSUNG DIGELAR

Jika izin dikeluarkan, BPJT bisa langsung menggelar lelang prakualifikasi. Selama 5 bulan-6 bulan prakualifikasi berjalan, pengadaan lahan tetap dilakukan.

Setelahnya, dilakukan pemasukan dokumen penawaran oleh peserta yang lolos prakualifikasi dan memerlukan waktu 6 bulan untuk mendapatkan pemenang.

Kemudian pemenang membutuhkan waktu 6 bulan-12 bulan untuk memfinalisasi proyek seperti pem-



Namun sayangnya, pemerintah masih belum yakin mengenai dana dukungan berupa PMN tersebut. Selama ini, penugasan yang diberikan pemerintah terhadap BUMN lainnya tidak menyertakan PMN di dalamnya.

"Mungkin ini yang masih dikaji oleh pemerintah, bagaimana perpres juga bisa mengakomodasi PMN," tutur Gani.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Tol Indonesia (ATI) Fachtur Rochman berpendapat penugasan badan usaha akan lebih baik karena mempercepat pembangunan jalan tol yang sudah dinantikan masyarakat Sumatra tersebut.

Jika pemerintah tetap melaksanakan pola tender seperti pada jalan tol umumnya, indikasi lambannya proyek sudah dapat dipastikan.

"Kalaupun memang pemerintah memprioritaskan proyek ini, maka pemerintah harus menempuh cara berbeda, mengingat jalan tol trans-Sumatra bukanlah seperti jalan tol lainnya yakni melalui perpres," ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan mengeluhkan sikap pemerintah pusat yang seolah tidak serius menangani proyek jalan tol trans-Sumatra karena belum terbitnya peraturan presiden serta tidak adanya penyertaan modal negara pada tahun ini.

Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan pemda sebetulnya sudah melakukan persiapan matang untuk melaksanakan pembangunan jalan tol ruas Palembang-Inderalaya yang masuk dalam proyek trans-Sumatra. (adrisal)

bentukan PT (perusahaan terbatas), pencairan kredit, dan sebagainya.

"Jadi, kalau secara proses memang akan lebih cepat dengan penugasan karena kan artinya pemerintah yang bangun tidak perlu ada pengadaan badan usaha. Namun, tentunya secara beban lebih besar dengan

penugasan," paparnya.

Pasalnya, sambung Gani, perusahaan yang ditugaskan membutuhkan ekuitas untuk melaksanakan proyek tersebut guna memperbesar kemampuan permodalan, sehingga diperlukan PMN untuk rencana penugasan ini.